



Jakarta, 8 - 9 November 2013

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXX KONGRES XI HATHI

TEMA :

**Pengelolaan Sumber Daya Air
dalam rangka Antisipasi Banjir dan Krisis Air**

Bekerjasama dengan:



DITJEN
SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PU



PEMERINTAH
PROVINSI
DKI JAKARTA



UNIVERSITAS
INDONESIA



UNIVERSITAS
GUNADARMA



4

MINGGU APRESIASI:
BERSAMA MENJAGA SUNGAI

12

MENAPAK LANGKAH BARU
SUNGAI CIKAPUNDUNG

20

PENGENDALIAN BANJIR DAN
REVITALISASI

air

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR



BERSAMA MENJAGA SUNGAI

ISSN 1693-8003



9 771693 800383

Pembina

Djoko Kirmanto
Mohamad Hasan • Mudjiadi
Eko Subekti • Arie Setiadi
Moerwanto • Pitoyo Subandrio
• A. Hasanudin • Hartanto

Penanggung Jawab

Leonarda Ibnu Said

Pemimpin Umum

Ardhyta Agus Setiawan

Pemimpin Redaksi

Trinanda SP Sitorus

Redaksi

Tine Rosdiana •
Kety Fillaily • Erytra Tiara •
Daswandi Budi Indra

Kontributor

Emir Faridz

Desain/Layout

M. Syauckani • Noor Cholis

TU/Sekretaris

Isbandiyah

Data

Nurullia Anjani •
Dewi Anggraeni • Marsono

Foto/Dokumentasi

M. Syauckani • M. Kurdi
• Sri Bagus Herutomo

Sirkulasi

Subbag TU Bina Program

Alamat Redaksi/TU

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Gedung Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air dan Penataan Ruang
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan
Telp. (021) 7396616 pes. 515
Fax. (021) 7210395
e-mail: humassda@yahoo.com
humassda@gmail.com

Diterbitkan oleh

Seksi Komunikasi Publik
Sub Direktorat Data dan Informasi
Direktorat Bina Program
Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum



EDITORIAL

Air itu selalu indah, namun demikian perilaku manusia yang telah mengubah keindahan air menjadi suatu bencana. Air sebagai sumber kehidupan masyarakat secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air.

Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Sungai sebagai wadah air yang mengalir berinteraksi melalui dua hubungan yaitu secara geohidrobiologi dengan alam dan secara sosial budaya dengan masyarakat. Semakin disadari bahwa keberhasilan pengelolaan sungai sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat.

Edisi kali ini mengangkat topik mengenai Bersama Menjaga Sungai.

Mengapa sungai perlu dijaga? Dahulu sungai adalah awal peradaban

manusia. Sungai dimanfaatkan sebagai beranda depan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai pemanfaatan sungai untuk pertanian, perikanan, pemanfaatan sungai untuk transportasi, pariwisata, hingga untuk pertahanan dan keamanan. Peradaban besar seperti peradaban sungai nil, peradaban di sungai eufrattigris, hingga kerajaan majapahit yang menjadi kerajaan besar berawal peradabannya dari sungai. Namun kini, sungai mulai berubah fungsi, sungai menjadi beranda belakang, daerah sempadan sungai berubah menjadi pemukiman liar, sungai sendiri menjadi tempat pembuangan akhir, dan tidak heran ketika berada di pintu air manggarai di jumpai sampah mulai sampah plastik, hingga kasur dan lemari pakaian.

Berangkat dari fakta sosial inilah, tema bersama menjaga sungai ini kami angkat.

Lomba foto dan malam apresiasi bersama menjaga sungai menjadi fokus perhatian kita, selain itu langkah-langkah bersejarah dalam upaya merevitalisasi sungai, merestorasi sungai pun kami ulas, yaitu upaya restorasi Sungai Cikapundung, serta ulasan-ulasannya yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.

Kami tidak ingin bangun dari mimpi kami, mimpi di mana sungai kembali menjadi beranda depan, sungai sebagai awal tumbuh berkembangnya peradaban masyarakat, sungai sebagai alat pemersatu bangsa.



LAPORAN UTAMA
MINGGU APRESIASI:
BERSAMA MENJAGA SUNGAI

Kegiatan dalam upaya membangun kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan perlu dilaksanakan terus-menerus. Dengan berinteraksi, diharapkan kita semua dapat memahami setiap kebijakan, dalam hal ini yang dilaksanakan Pemerintah, serta bersama menjaga objek yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat, yakni sungai kita untuk masa depan anak dan cucu.



LAPORAN UTAMA
COACHING CLINIC FOTOGRAFI “BERSAMA MENJAGA SUNGAI”: FOTO BISA JADI AGENT OF CHANGE

Fotografi saat ini dimanjakan oleh teknologi, banyak fotografer lebih mengandalkan kecanggihan teknologi, dan meninggalkan estetika, seni, teknik pengambilan gambar, di dalam mendokumentasikan suatu objek.



LAPORAN UTAMA
MENAPAK LANGKAH BARU DI CIKAPUNDUNG

Mimpi akan menjadi kenyataan. Begitulah harapan masyarakat di di sekitar bantaran Sungai Cikapundung, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, betapa tidak, pada tanggal 27 Oktober 2013 akan di ingat sebagai dimulainya sejarah baru, kembali sungai sebagai ruang publik, kembalinya sungai sebagai beranda depan.



LAPORAN KHUSUS
MENTERI PEKERJAAN UMUM RESMIKAN BENDUNG GERAK TEMPE

Sebagai bagian dari *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Koridor Sulawesi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan Bendung Gerak Tempe, Kabupaten Wajo dan beberapa proyek infrastruktur lainnya di Maros, Sulawesi Selatan (21/09).



LAPORAN KHUSUS
DIRJEN SDA TINJAU PELAKSANAAN P4-ISDA DI KABUPATEN KARAWANG: PEMERINTAH AKAN BANTU SECARA LANGSUNG

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan P4-ISDA-IK (Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dirjen SDA Mohamad Hasan, melakukan kunjungan ke Desa Kalisari di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang (16/10).



LAPORAN KHUSUS
KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN PU DENGAN MLIT JEPANG

Pertemuan ini membahas kerjasama dengan Pemerintah Jepang dimana sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Cooperation oleh Menteri Pertanian, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang dengan Menteri Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu.

LAPORAN UTAMA

- 4 Minggu Apresiasi: Bersama Menjaga Sungai
- 8 *Coaching Clinic* Fotografi “Bersama Menjaga Sungai”:
Foto Bisa Jadi *Agent of Change*
- 12 Menapak Langkah Baru di Cikapundung
- 14 Menteri Pekerjaan Umum Resmikan Bendung Gerak Tempe

LAPORAN KHUSUS

- 16 Dirjen SDA Tinjau Pelaksanaan P4-ISDA di Kabupaten Karawang: Pemerintah Akan Bantu Secara Langsung
- 18 Kerjasama Bilateral Kementerian PU dengan MLIT Jepang
- 20 Pengendalian Banjir dan Revitalisasi
- 24 Pertemuan MHI dan MHS Fokus pada *Sharing* Teknologi Hidrologi
- 26 Seminar HATHI Yogyakarta: Forum untuk Atasi Permasalahan SDA
- 28 Tanggap Darurat Penanganan Bendung Alam Way Ela

PROFIL INFRASTRUKTUR

- 30 Bendung Gerak Tempe Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

FOKUS

- 32 Bimbingan Teknis LAKIP
- 34 Normalisasi Kali Sunter di Lanud Halim Perdanakusuma

PERSPEKTIF

- 36 Pertemuan Regional O&P Prasarana O&P Wilayah Barat
- 38 Hasil Pertemuan Regional O&P Wilayah Barat di Pekanbaru: Mengedepankan Kemandirian Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- 40 Sidang Pleno II TKPSDA Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Membahas Penetapan Wilayah Sungai

BERANDA

- 42 Indonesia Riverboarding Association: Salam Seajar

MINGGU APRESIASI: BERSAMA MENJAGA SUNGAI



Kegiatan dalam upaya membangun kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan perlu dilaksanakan terus-menerus. Dengan berinteraksi, diharapkan kita semua dapat memahami setiap kebijakan, dalam hal ini yang dilaksanakan Pemerintah, serta bersama menjaga objek yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat, yakni sungai kita untuk masa depan anak dan cucu.

Interaksi bersama, yakni antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), dengan masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan dilakukan, dengan mengusung tema bersama menjaga kelestarian sungai.

Untuk memfasilitasi interaksi antara Pemerintah dan masyarakat, Ditjen SDA mengadakan Lomba Foto yang dibuka untuk umum bertemakan "**Bersama Menjaga Sungai**". Kegiatan lomba foto ini mendapatkan respon positif dari para peserta, terbukti dengan jumlah foto yang masuk sebanyak 661 karya foto, dari 252 fotografer yang tersebar dari Jakarta, Bandung, Kendal, Medan, Surabaya, Denpasar, hingga Papua.

Kegiatan lomba fotografi dipilih karena sebuah foto dapat menggambarkan banyak makna, realitas sosial, sebuah fakta sosial. Pada dasarnya selembar foto adalah media ungkapan berkomunikasi seorang fotografer kepada pengamat foto tersebut. Sebuah foto adalah ungkapan bahasa gambar/visual seseorang. Jika kita mengarahkan kamera ke suatu obyek tertentu, dalam benak pemotret akan muncul keinginan memperlihatkan hasil fotonya kepada seseorang. Seseorang di sini bisa sebagai penikmat, maupun publik secara luas. Keinginan bercerita terkadang menjadi kebutuhan seseorang. Sehingga pada saat itulah



foto menjadi alat untuk berkomunikasi, sebagai media untuk bercerita.

Lomba foto dengan tema **Bersama Menjaga Sungai** ini menjadi sarana berkomunikasi antara manusia dan alam. Bagaimana pentingnya menjaga

dan mengelola sungai. Terlebih, menumbuhkan kepedulian terhadap sungai.

Ditjen SDA mengemas kegiatan ini dalam berbagai rangkaian kegiatan, yang ditutup dalam berbagai rangkaian



acara, berupa arung sungai di PLTA Saguling, Bantar Caringin, Citarum Tengah, Padalarang, Jawa Barat, *coaching clinic* seni fotografi dengan pembicara salah satu fotografer profesional, Drigo L. Tobing, serta Malam Apresiasi dalam bentuk *Gala Dinner* untuk mengumumkan para pemenang lomba foto (19/10). Serangkaian kegiatan interaktif ini diikuti oleh 25 nominator dengan hasil karya foto terbaik.

Malam Apresiasi ***Bersama Menjaga Sungai*** dihadiri oleh Direktur Bina Penatagunaan SDA, Arie Setiadi Moerwanto, Kasubdit Data dan Informasi, Leonarda Ibnu Said, Kasubdit Perencanaan OP, Hendra Ahyadi, PPK OP I BBWS Citarum, Yayat Yuliana dan komunitas-komunitas yang berkecimpung di bidang sumber daya air.

“Indonesia memiliki potensi cadangan sumber daya air sebesar +3.906 milyar m³/tahun yang tersebar di seluruh tanah air dalam 8.007 daerah aliran sungai dan 521 danau dengan volume andalan yang dapat dimanfaatkan sebesar +690 milyar m³/tahun. Namun di Indonesia juga merupakan negara yang paling rawan terhadap kekeringan dan hal ini disebabkan oleh kurang terdistribusi secara merata sehingga ada wilayah yang kekurangan air,” jelas Ari Setiadi dalam sambutannya.

Lanjut Ari Setiadi, air mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Dengan fungsi sosial berarti bahwa sumber daya air lebih diutamakan untuk kepentingan umum, sedangkan fungsi lingkungan berarti bahwa pengelolaan sumber daya air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Dan fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat

didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Potensi sumber daya air tersebut perlu dikelola lebih lanjut untuk penyediaan air bagi berbagai keperluan air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri serta irigasi termasuk di dalamnya pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan keperluan pembangkit tenaga listrik.

“Khusus untuk sungai sebenarnya sudah lama dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia dan sebagai wadah air selalu berada di posisi paling rendah dalam lanskap bumi, sehingga masyarakat sebagai pemanfaatnya harus diajak untuk mengenali permasalahan, keterbatasan dan manfaat pengelolaan sungai secara lengkap dan benar sehingga dapat tumbuh kesadaran untuk ikut berpartisipasi mengelola sungai,” kata Direktur Bina Penatagunaan SDA.





Pada malam apresiasi **Bersama Menjaga Sungai** diumumkan pula nama para pemenang yaitu:

1. Kusnadi (Jawa Barat) sebagai pemenang pertama dengan tema foto "Memilih Sampah Sungai"
2. Prasetyo B. Utomo (Kendal) sebagai pemenang kedua dengan tema foto "Sungai is my life"
3. Fernando Toga (Jakarta) sebagai pemenang ketiga dengan tema foto "Aktivitas MCK"
4. Rozie Soehendy (Bandung) sebagai pemenang harapan pertama dengan tema foto "Revitalisasi Sungai Citarum"
5. Andi wijaya (Bandung) sebagai pemenang harapan kedua dengan tema foto "Perbaikan Sarana dan Prasarana Sungai"

Total hadiah untuk kelima pemenang adalah Rp 26 juta.

Kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini khususnya komunitas fotografi dan komunitas lingkungan sekitar daerah aliran sungai Citarum. Dengan adanya acara tersebut diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan peduli keadaan sungai, mengingat keadaan sungai di Indonesia khususnya di Jawa Barat sudah sangat kotor sehingga membutuhkan perhatian semua pihak. **(nan/tim datin SDA).**

GLOSSARY

Sungai

Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

COACHING CLINIC FOTOGRAFI BERSAMA MENJAGA SUNGAI FOTO BISA JADI *AGENT OF CHANGE*



Hal ini menunjukkan bahwa sebagian foto yang masuk tidak meng "*capture*" secara mendalam arti bersama menjaga sungai. Sehingga lebih terlihat ciri khas fotografi media massa yang lebih meng-*capture moment*, sehingga kurang memprioritaskan komposisi dan pencahayaan. Yang sebenarnya, dalam fotografi, tiga kata dalam tema tersebut harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Sang fotografer pun harus betul-betul mendatangi, mendalami dan mendekati objek yang dimaksud, tidak hanya sekedar mengambil foto dengan objek sungai, apalagi bila foto tersebut diambil dari kejauhan. "Untuk memotret dengan hasil baik, disarankan mulai pukul 6-9 pagi atau pukul 15-17 sore", lanjut Drigo dalam sesi *Coaching Clinic* yang pesertanya adalah para nominator lomba Foto "Bersama menjaga Sungai", di Hotel Gino Feruci, Bandung (19/10).

Fotografi saat ini dimanjakan oleh teknologi, banyak fotografer lebih mengandalkan kecanggihan teknologi, dan meninggalkan estetika, seni, teknik pengambilan gambar, di dalam mendokumentasikan suatu objek.

Berkaitan dengan tema Bersama Menjaga Sungai yang diusung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Drigo dengan yakin memperkirakan bahwa sekitar 60% dari total 661 foto yang masuk dan dinilai oleh dewan juri, adalah berasal dari fotografer media massa. Selebihnya merupakan fotografer yang memang hobi fotografi.

Banyaknya foto yang masuk serta batas waktu penilaian oleh dewan juri yang sangat terbatas, tentulah menjadi tantangan bagi ketiga dewan juri dalam menentukan para pemenang lomba, yang tentu melalui berbagai argumentasi pendapat antar dewan juri.



Diingatkan Drigo, seni fotografi bisa menjadi "agent of change", apabila foto yang dihasilkan dapat "menggeliitik" hati dan pikiran orang yang melihat, tentu bukan hanya sekedar foto yang dilihat 5 detik, lalu

lewat begitu saja di ingatan orang yang melihat (foto-red).

Drigo mengharapkan agar para fotografer, baik profesional ataupun yang hobi fotografi, agar selalu

berpikir "out of the box" dalam mendokumentasikan objek foto. Hal ini harus didasari oleh cara berpikir bahwa fotografer tidak mengambil foto, melainkan membuat foto. (nan/anjltin/lech)

PEMENANG LOMBA FOTO "BERSAMA MENJAGA SUNGAI"



Juara I : **Memilih Sampah Sungai**, Kusnadi - Bandung



Juara II : **Sungai Is My Life**, Prasetiyo Budi Utomo - Kendal



Juara III : **Aktivitas MCK**, Fernando Toga - Jakarta



Juara Harapan I : **Revitalisasi Sungai Citarum**,
Rozie Soehendy - Bandung



Juara Harapan II : **Perbaikan Sarana Prasarana Sungai**
Andi Wijaya_Bandung

20 FOTO TERBAIK DALAM RANGKA LOMBA FOTO



Bersama Menjaga Sungai
Arista Kusumastuti - Jakarta



Memancing di Kali Asin
Arif Nugroho - Semarang



Meniti Bersama
Ekoningtyas Margu W. - Depok



Bersihkan Sungai
M. Iqbal Ichsan



Menjaga Kebersihan Sungai
Wahyu Sulistiyawan - Semarang



Kerja Bakti Membersihkan Sungai
Kammil Ardhi Baskara - Semarang



Menebar Ikan di Sungai
Tommy Sasongko - Bali



Normalisasi Sungai
Aditia Noviansyah - Jakarta



Mencari Sampah di Sungai
Ujang Hidayat - Bandung



Pembersihan Sungai
Irsan Mulyadi - Medan

“BERSAMA MENJAGA SUNGAI”



Pemulung Kali Ciliwung
Imam Buhori - Jakarta



Perawatan Sungai
Bayu Nadya Kusuma - Yogyakarta



Sulitnya Bersihkan Sungai
Herianus - Jakarta



Pemulung Plastik
Bani Gunadi - Jakarta



Sungai di Batam
Roki Pandapotan - Jakarta



Seorang Bapak Membersihkan Sampah di Sungai
Saktiawan Gading W - Malang



Sungai Ditengah Kota
Dasril Roszandi - Jakarta



Stop Eksploitasi
Boy R. Harjanto - Solo



Waduk Pluit
Rangga Satya A - Depok



Sungai Siak Sebagai Jalur Transportasi
Arief Bagus Prasetyo - Bogor

MENAPAK LANGKAH BARU DI CIKAPUNDUNG



Mimpi akan menjadi kenyataan. Begitulah harapan masyarakat di sekitar bantaran Sungai Cikapundung, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, betapa tidak, pada tanggal 27 Oktober 2013 akan diingat sebagai dimulainya sejarah baru, kembali sungai sebagai ruang publik, kembalinya sungai sebagai beranda depan. Pada hari inilah dimulainya peletakan batu pertama pekerjaan revitalisasi Sungai Cikapundung sebagai bagian dari upaya restorasi sungai yang terbentang dari kawasan Babakan Siliwangi sampai dengan kawasan Bendung Leuwi Limus.

Kegiatan peletakan batu pertama revitalisasi Sungai Cikapundung ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Moh. Hasan, Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Komunitas Peduli Sungai Cikapundung, dan masyarakat di sekitar Sungai Cikapundung di kawasan Babakan Siliwangi. Ada banyak harapan dari kegiatan ini, salah satu yang ditekankan oleh Walikota Bandung adalah, ini akan menjadi titik sejarah baru menuju BANDUNG JUARA. Pekerjaan tahap pertama ini diharapkan akan selesai pada tahun 2014, dan dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan sinergi dan harmoni antara masyarakat dan sungainya.



Sungai Cikapundung merupakan salah satu anak Sungai Citarum dengan panjang 28 km, dengan luas sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 154 km², Sungai Cikapundung mengalir melintasi Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan bermuara di Kabupaten Bandung. Sungai Cikapundung 68 (enam puluh delapan) persennya melewati pemukiman padat penduduk, di mana warga melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengandalkan Sungai Cikapundung. Dapat dibayangkan bahwa aktivitas manusia ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mandi, mencuci, namun juga sebagai tempat pembuangan akhir.

Di sisi lain Sungai Cikapundung menyimpan potensi yang luar biasa untuk potensi air baku, potensi pembangkit tenaga listrik, sumber air untuk irigasi, potensi wisata alam, geologi, dan air, hingga untuk ruang terbuka publik.

Adalah perjalanan panjang dalam mewujudkan upaya revitalisasi Sungai Cikapundung ini, hingga pada tanggal 11 Februari 2011, dideklarasikan Gerakan Cikapundung Bersih, di mana pihak-pihak yang terlibat antara lain Kemen PU, Ditjen Ciptakarya, Tataruang, BBWS Citarum, Kemenpera, Bappenas, Kemenristek, BPPT, Provinsi Jabar: BPLHD, Kabupaten Bandung Barat, United Nations, Perusahaan, Media, Akademisi.

Dukungan dalam upaya revitalisasi Sungai Cikapundung tidak hanya dari instansi pemerintah dan pendidikan, kegiatan ini juga didukung oleh komunitas-komunitas, melalui Program Rehabilitasi Cikapundung/Cikapundung Rehabilitation Program (CRP) yang

merupakan gerakan komunitas sejak tahun 2009.

Dalam waktu 3 tahun program Revitalisasi Sungai Cikapundung telah menghasilkan 43 komunitas sekaligus mendorong inisiatif kerjasama dan kemitraan komunitas dalam pengelolaan sungai kota yang terintegrasi antara warga bantaran, pemerintah kota dan pihak swasta. Sejak tahun 2011, Komunitas Cikapundung dengan bantuan dari pemerintah, swasta dan akademisi juga menanam pohon di daerah aliran Sungai Cikapundung, menanam *vetiver* untuk mencegah longsor serta membuat *septic tank* komunal.

Dalam upaya ke depannya, visi dari Gerakan Cikapundung Bersih ini adalah mewujudkan DAS Cikapundung sebagai kawasan yang bersih, indah, tertib dan bercitra baik bagi Kota Bandung berdasarkan aspek lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya. Adapun misi yang diemban adalah dengan potensi Sungai

Cikapundung, Bandung akan menjadi kota pertama di Asia yang memiliki *Ecotechno Riverpark* di tengah kota sekaligus mengukuhkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata internasional.

Akhirnya wujud langkah nyata dari Deklarasi Cikapundung Bersih ini adalah dengan upaya restorasi Sungai Cikapundung melalui kerjasama yang apik antara Pemerintah Kota Bandung dengan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan *pilot project* di kawasan Babakan Siliwangi, diwujudkanlah mimpi mentah sungai ini.

Konsep restorasi Sungai Cikapundung ini memiliki visi tersedianya ruang terbuka publik di sepanjang Sungai Cikapundung untuk edukasi, rekreasi, olah raga & membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Adapun misinya adalah menyediakan ruang terbuka publik untuk peraga edukasi, *amphiteater*, *joging track*, luncuran *rafting* dan *tubing* serta *commercial spot* yang beradaptasi dengan sistem Sungai Cikapundung. Lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Site development*
2. Pembangunan *amphitheater*
3. Pembangunan *operational maintenance area facility*
4. Pembangunan *jogging track*
5. Pembangunan *sculpture area*
6. Pembangunan *natural area*
7. Pembangunan *commercial spot*
8. Penataan *landscape*
9. Pembangunan *education area*
10. Pekerjaan mekanikal elektrikal
11. Pembangunan luncuran *rafting* dan *tubing (ard)*



MENTERI PEKERJAAN UMUM RESMIKAN BENDUNG GERAK TEMPE



Sebagai bagian dari *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Koridor Sulawesi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meresmikan Bendung Gerak Tempe, Kabupaten Wajo dan beberapa proyek infrastruktur lainnya di Maros, 21 September 2009 di Sulawesi Selatan.



Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pembangunan bendungan baru dapat mendukung produksi sekitar 10 ribu hektare lahan sawah, sehingga persawahan di sekitar Bendung Gerak Tempe nantinya dapat berproduksi secara optimal.

Dengan adanya bendungan, lahan pertanian dapat berproduksi menjadi tiga kali panen dalam setahun. Selama ini, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah penyangga pangan nasional di kawasan timur Indonesia mampu menghasilkan Rp 21 triliun per tahun dengan rata-rata Rp 3 triliun—Rp 7 triliun dalam 100 hari atau setiap masa panen,” katanya.

“Koridor Sulawesi yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan, perkebunan, pertanian dan pertambangan ini akan terus mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunannya. (Kehadiran Bendung Gerak Tempe—red) berfungsi untuk mendukung sektor perikanan dan pertanian, jaringan irigasi yang andal dan jaminan ketersediaan air bagi masyarakat,” kata Djoko Kirmanto dalam sambutannya.

Menteri Pekerjaan Umum lebih lanjut menyatakan bahwa koridor

Sulawesi merupakan bagian dari *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan, sehingga akan terus mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunannya.

Sementara itu PPK Pembangunan Bendung Gerak Tempe, Eka Rahendra, mengatakan Bendung Gerak Tempe ini dibangun dengan tujuan agar dapat menjaga permukaan air Danau Tempe sampai pada tingkat permukaan air terendam optimum yang terjadi ketika musim kemarau, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dengan target produksi 30–50 ton ikan/per tahun.

Eka juga memaparkan, keberadaan Bendung Gerak Tempe selain memberikan manfaat di bidang pertanian, juga sebagai penyedia pasokan air baku PDAM Kota Sengkang, dan sebagai sarana pariwisata dan transportasi air dari Sungai Cenranae ke Danau Tempe melalui fasilitas pintu navigasi.

Bendung Gerak Tempe sendiri dibangun selama tiga tahun, mulai tahun 2010 sampai tahun 2012 dengan anggaran

sebesar Rp 139 miliar, yang bersumber dari dana APBN murni. Dengan dibangunnya Bendung Gerak Tempe, nantinya tampungan air danau pada musim kemarau menjadi sebesar 124,2 juta m³, dengan luas genangan 132,9 km² yang bisa dimanfaatkan oleh sekitar 3.120 KK nelayan di sekitar Danau Tempe. Hal ini akan jauh lebih baik, dibanding sebelumnya, di mana pada musim kemarau luas genangan umumnya hanya sekitar 22,54 km² dengan volume tampungan hanya 5,76 m³. Selain itu, dengan dipertahankannya muka air pada elevasi +5.0 meter, maka suplai untuk air baku PDAM Kota Sengkang bisa lancar. Di mana selama ini di musim kemarau, muka air sungai turun hingga elevasi +3.0 m. Hal ini mengakibatkan pompa intake PDAM sulit untuk dioperasikan.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohamad Hasan, Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Murjanto, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang Agus Setiawan serta beberapa pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. (*idrrchs*)



DIRJEN SDA TINJAU PELAKSANAAN P4-ISDA DI KABUPATEN KARAWANG:

PEMERINTAH AKAN BANTU SECARA LANGSUNG



P4-ISDA-IK sendiri adalah salah satu program khusus yang dirancang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar berupa rehabilitasi irigasi kecil dan infrastruktur sumber daya air, dan bertujuan membuka akses masyarakat terhadap irigasi dan air bersih sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan P4-ISDA-IK (Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Irigasi Kecil) di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dirjen SDA Mohamad Hasan, pada tanggal 16 Oktober 2013, melakukan kunjungan ke Desa Kalisari di Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang (16/10).

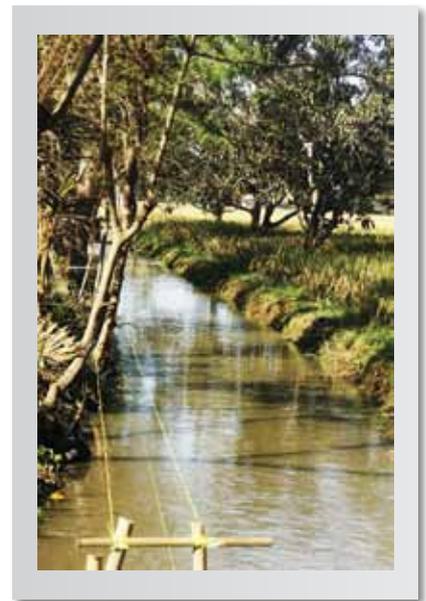




Dalam sesi tanya jawab, para petani mengharapkan agar irigasi utama segera diperbaiki dan direhabilitasi agar distribusi air tidak terhambat. Dalam sesi ini pula, Mohamad Hasan mengingatkan agar masyarakat secara bersama-sama dapat mengawal pelaksanaan P4-ISDA, dan setiap pembiayaan pekerjaan fisik dan belanja yang nantinya ditransfer ke rekening kelompok tani dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. (idrlanj)

Kunjungan lapangan ini dikemas dalam bentuk ramah tamah dengan para P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). Dalam kunjungan tersebut, Mohamad Hasan menyampaikan agar setiap kelompok P3A mampu menuntaskan kegiatan P4-ISDA-1K dengan baik. Sebab terlaksananya P4-ISDA-1K ini sangat bergantung pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil tersebut.

“Pemerintah akan membantu secara langsung rehabilitasi prasarana irigasi di mana pelaksanaannya akan diswadayakan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan tentu untuk meningkatkan produksi pertanian serta pendapatan dan perekonomian peserta,” tutur Mohamad Hasan. “Sejauh ini produksi pertanian di daerah ini yang ada cukup menggembirakan, yakni mencapai sekitar 6 ton per hektar. Bila para kelompok tani memerlukan pelatihan dan pembinaan untuk lebih meningkatkan produksi pangan, maka pemerintah siap menindaklanjuti hal tersebut,” lanjutnya.



KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN PU DENGAN MLIT JEPANG



Pertemuan ini membahas kerjasama dengan Pemerintah Jepang di mana sebelumnya telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Cooperation* oleh Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang dengan Menteri Pekerjaan Umum beberapa waktu lalu. Pertemuan ini akan diadakan secara berkala dan diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kerjasama di antara kedua Kementerian.

“Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini ditujukan pada keseimbangan pembangunan dengan konsep berkelanjutan dengan lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan (*green construction*) yang akan memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih signifikan,” jelas Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak saat membuka pertemuan *The First Vice-Ministerial Meeting on Infrastructure Development* (MLIT) dengan Pemerintah Jepang 9 September 2013 di Jakarta.



Kementerian PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPI – PU), dan rencana aksi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman secara berkelanjutan yang ramah lingkungan, hemat energi dan tidak merusak lingkungan.

“Khusus bidang sumber daya air, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu konservasi sumber daya air dengan tujuan memberikan dukungan ketahanan air, pendayagunaan sumber daya air guna dukungan terhadap ketahanan pangan, dan pengendalian daya rusak air termasuk pengamanan terhadap bencana seperti banjir dan pengamanan pantai,” jelas Hermanto.

Indonesia dan Jepang berada pada letak geografis yang rawan bencana. Saat Indonesia mengalami bencana alam letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Menteri MLIT Jepang menawarkan kerjasama di bidang infrastruktur untuk membangun kembali fasilitas infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Merapi ini. Sebaliknya pada saat bencana tsunami yang terjadi di Jepang beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menyampaikan rasa duka dan simpati kepada Pemerintah Jepang dan keluarga para korban bencana tsunami.

Diharapkan, Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang dapat saling memperkaya pengalaman yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. (*idr*)



PENGENDALIAN BANJIR DAN REVITALISASI



Dalam mengatasi hal tersebut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membuat program-program untuk mengatasi banjir di ibukota salah satunya yaitu membelokkan aliran dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dengan debit 60m³/dtk sepanjang 2.020 km. "Program yang sudah selesai dikerjakan seperti KBT dan Kanal Banjir Barat (KBB), saat ini yang sedang dikerjakan adalah Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter yang akan selesai tahun 2014. Untuk pintu air Manggarai dan Karet akan dibuat pintu air yang akan selesai April 2014," jelas Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio dalam acara *Wide Shot*, Metro TV, 2 Oktober 2013 di Jakarta.

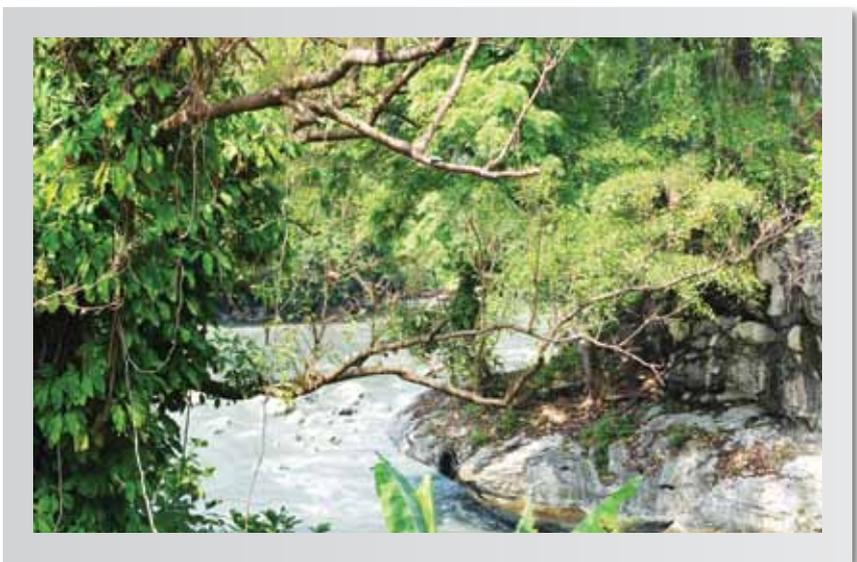
Seiring dengan jalannya waktu, pengendalian banjir di Jakarta saat zaman Belanda menggunakan rawa sebagai tempat resapan. Tetapi saat ini bertambahnya penduduk di Jakarta mengakibatkan rawa-rawa tersebut sudah berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini lah salah satu yang menyebabkan banjir di Jakarta.



Sedangkan untuk Kali Ciliwung sendiri dimulai dari pintu air Manggarai sampai jalan tol TB Simatupang akan dinormalisir, di mana saat ini lebarnya hanya 15 meter dan akan diperlebar hingga 45–50 meter yang mampu mengalirkan debit sampai dengan 570 m³/dtk.

Pitoyo menambahkan pengendalian banjir bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara struktural dan non struktural. Non struktural disini yaitu mengelola manusia yang tinggal di kawasan tersebut. Seperti contoh di Waduk Pluit, harus disosialisasikan bahwa daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang berbahaya. Selain itu harus mematuhi sepadan sungai dan sepadan pantai yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari bahaya dan sampah yang juga merupakan salah satu penyebab banjir, harus disosialisasikan agar tidak membuang sampah sembarangan.

Seperti contoh Waduk Sermo di daerah Kulon Progo, mempunyai air yang jernih. Masyarakat di sana menyadari bahwa waduk ini merupakan sumber kehidupan mereka. Diharapkan masyarakat Jakarta bisa mencontoh hal tersebut. Dan juga masyarakat yang tanahnya terkena normalisasi seperti Pesanggrahan dan Sunter diharapkan segera menyelesaikan pembebasan tanah agar dapat segera dilakukan pengerjaan pengendalian banjir. (*datinsda*)





**NATURAL
AREA**

**MEKANIKAL
ELEKTRIKAL**

**OPERATIONAL
MAINTENANCE
AREA**

**KOMERSIAL
SPOT**

**SCULPTURE
AREA**

LANDSCAPE

**JOGGING
TRACK**



KONSEP RESTORASI SUNGAI CIKAPUNDUNG

(KAWASAN BABAKAN SILIWANGI HINGGA BENDUNG LEUWI LIMUS)



AMPHITHEATRE

DROP OFF AREA

EDUCATION AREA



Kerjasama:



PERTEMUAN MHI DAN MHS FOKUS PADA *SHARING* TEKNOLOGI HIDROLOGI



Malaysian Hydrological Society (MHS) melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) 23 Oktober 2013 di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta. Kunjungan ini merupakan realisasi dari kerjasama antara MHI dan MHS yang difokuskan pada teknologi hidrologi dan sumber daya air.

Pada hari pertama, MHS dengan didampingi pejabat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meninjau Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Delegasi MHS menyatakan pentingnya kunjungan ke KBT ini untuk melihat langsung keberhasilan Ditjen SDA Kementerian PU dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian banjir di DKI Jakarta. Turut dibahas dalam kegiatan tersebut mengenai rencana pembangunan *Jakarta Giant Sea Wall* sebagai bagian dari program *Jakarta Coastal Defense*.

Pada hari kedua, MHI dan MHS melakukan Pertemuan Pertama sekaligus Kongres MHI ke-IV.

Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi dan tukar menukar pengalaman dan teknologi dalam bidang hidrologi dan sumber daya air bagi kedua negara.

Dalam sambutannya Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyampaikan harapannya agar anggota MHS dan MHI dapat menjalankan visi dan misinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan yang berkaitan dengan bidang hidrologi dan sumber daya air.

"Saya mengharapkan MHI dengan pembahasan dalam pertemuan hari ini dapat merumuskan saran-saran positif kepada Pemerintah Indonesia dan Malaysia dan mensosialisasikannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian target pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pangan dapat dicapai," tutur Djoko Kirmanto.

Sementara Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia sekaligus Presiden Persatuan Hidrologi Malaysia (MHS), Datuk Ir. Hj Ahmad Husaini bin Sulaiman menyatakan pertemuan ini digagas untuk melihat langsung konsep penanganan banjir di Jakarta oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab Jakarta dan Kuala Lumpur sebagai kota metropolitan menghadapi isu dan permasalahan banjir yang sama.

Turut hadir dalam acara tersebut Pengarah Bahagian Sumber Air dan Hidrologi Malaysia; perwakilan anggota MHS; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Kepala Badan Informasi Geospasial; perwakilan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU; perwakilan Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian PU; perwakilan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; perwakilan Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas; perwakilan Kepala UPT Hujan Buatan BPPT, serta perwakilan Direktur Utama PJT I dan PJT II. (idr)



SEMINAR HATHI YOGYAKARTA

FORUM UNTUK ATASI PERMASALAHAN SDA



Hermanto Dardak mengatakan melalui program-program yang disajikan tentu saja sangat berkaitan dengan isu-isu penting dalam menyusun perspektif baru dan cara baru dalam melihat masa depan dan menetapkan tujuan yang spesifik terkait dengan bidang pengelolaan sumber daya air dalam kaitannya dengan bencana terkait air.



Untuk berbagi pengalaman dalam pengembangan sumber daya air serta kaitannya dalam menanggulangi dampak bencana yang berhubungan dengan air, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) mengadakan Seminar International yang bertemakan *Water Related Disaster Solutions, Yogyakarta, (6/9)*. "Seminar ini merupakan wadah forum untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan sumber daya air yang disebabkan oleh perubahan iklim," ujar Hermanto Dardak.



Ada lima sub tema yang dibahas dalam seminar HATHI, di antaranya inovasi teknologi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air, implementasi pengendalian tata ruang dalam upaya mengendalikan banjir dan antisipasi krisis air, penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dalam rangka pengendalian banjir, dan peran *stakeholder* dalam upaya konservasi sumber daya air wilayah sungai.

“Saya mengharapkan agar para ahli Indonesia bersama-sama dengan para ahli internasional akan memiliki pemikiran baru dalam mengadaptasi strategi untuk mengurangi dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim”, lanjut Hermanto Dardak.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Bidang Teknik dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Turisme Jepang, Toshiyuki Adachi, menjelaskan bahwa Jepang mendukung ajang berbagi pengalaman, terlebih lagi negara Jepang merupakan salah satu negara yang sudah berpengalaman dalam mengatasi bencana, termasuk bencana terkait dengan pengairan, yakni banjir. Menurutnya, Indonesia dan Jepang memiliki kemiripan secara geografis, dan permasalahan pengairan yang sama, yakni penggunaan air secara berlebihan. “Kami memiliki berbagai variasi teknologi untuk penanganan bencana dan pasca bencana, termasuk pencegahan bencana melalui teknologi dam yang mutakhir,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan, Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjadi, Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio, Direktur Bina Program Hasanudin dan peserta seminar dari beberapa negara di Asia seperti India, Jepang dan Cina. *(dan/anj)*



TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENDUNG ALAM WAY ELA



Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mohamad Hasan, didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku dan Kepala Dinas PU Maluku, mengunjungi lokasi Bendung Alam Way Ela, di Desa Negeri Lima, Maluku Tengah, yang jebol akhir Juli lalu (27/8).

Hasan mengatakan penanganan jebolnya Bendung Alam Way Ela berfokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat darurat, seperti pembangunan jembatan darurat, *guiding wall*, *check dam* dan *sand pocket*. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan aliran sungai, supaya aliran tidak terpecah-pecah seperti saat ini. "Pengerjaan infrastruktur darurat ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun. Pembangunan jembatan permanen sendiri akan dilakukan segera setelah aliran sungai dan kontur tanah stabil," kata Hasan.





Mengingat potensi bahaya bagi penduduk di hilir masih sangat tinggi, lebih lanjut Hasan merekomendasikan agar penduduk disana direlokasi dan tidak kembali ke lokasi semula, paling tidak dalam satu siklus banjir besar yang berlangsung sekitar lima tahunan. "Untuk itu kami melakukan koordinasi dengan pemda setempat mengenai penanganan masalah sosial yang timbul akibat bencana jebolnya Bendung Way Ela ini," tutur Hasan. "Pemda harus mencari solusi berupa relokasi penduduk ke tempat lain, sebab penduduk tidak mungkin terlalu lama tinggal di tenda-tenda pengungsian. Namun relokasi ini kami harapkan dilakukan dengan penggunaan pendekatan dialog," lanjutnya.



Berkaitan dengan waduk alternatif untuk pasokan air baku Kota Ambon, Hasan mengatakan saat ini Ditjen SDA sedang menjalankan pembangunan waduk di Way Ruhu dan Batu Gantung di dekat Ambon. Selain bermanfaat untuk pasokan air baku Ambon, waduk ini nantinya juga bermanfaat untuk mengurangi dampak banjir di Ambon.

Hasan menggarisbawahi bahwa potensi bahaya jebolnya bendung alam Way Ela saat ini masih ada meski tidak sebesar sebelumnya. Karena itu Ditjen SDA telah menyiapkan high risk map, yang memetakan resiko bahaya di Way Ela. "Potensi ini paling tidak akan tetap ada sekitar lima tahun sampai aliran sungai dan kontur tanah stabil nantinya," pungkas Hasan. *(idr/dan)*



BENDUNG GERAK TEMPE KABUPATEN WAJO, PROVINSI SULAWESI SELATAN



Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, pernah menjuluki danau Tempe sebagai “mangkuk raksasanya ikan tawar di Indonesia”. Julukan ini tidak salah tertuju pada danau yang terletak di kecamatan Tempe dikarenakan saat di tahun 1950-an danau ini mampu menghasilkan ikan air tawar sebanyak 50.000 ton/per tahunnya.

Namun, kerusakan alam yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran, yang terjadi sejak 1980-an, membuat kedalaman Danau Tempe sangat bervariasi antara musim kemarau dan musim hujan akibat rusaknya hutan bagian hulu sungai Walanae dan Sungai Bila, hal tersebut menyebabkan produksi perikanan dari 10.000 ton/th menjadi sekitar 5000–6000 ton/th di tahun 1990–2000. Kerusakan ini terus terjadi, sehingga jika tidak segera tertangani, degradasi lingkungan dapat segera dialami Danau Tempe.



untuk perikanan, irigasi dan air baku PDAM.

Adapun tujuannya adalah mengembalikan kondisi produktif Danau Tempe untuk dapat kembali memproduksi ikan air tawar seperti pada waktu lampau, serta dapat menyerap tenaga kerja di bidang perikanan.

PT. Waskita Karya (Persero), dengan konsultan pengawas dari PT. Indra Karya (Persero). Pembangunannya memakan biaya sebesar Rp. 139.159.512.000,- (termasuk PPN), yang berasal dari dana APBN Murni (multi years TA.20102–2012).

Dengan dibangunnya Bendung Gerak Tempe ini, nantinya tumpungan air danau di musim kemarau dapat dipertahankan, belum lagi kegiatan pariwisata dan transportasi air dari Sungai Cenranae ke Danau Tempe dapat terus berlangsung. (*nan/lech*)

Pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pekerjaan Umum, di tahun 2002–2003 mengadakan kegiatan studi Masterplan Study on Integrated Development of Walanae-Cenranae River Basin oleh Nippon Koei. Co.Ltd., yang salah satu hasil rekomendasinya adalah untuk mengadakan program dalam rangka mengembalikan kualitas lingkungan melalui kegiatan Pengelolaan Danau Tempe secara terpadu, termasuk kegiatan pembangunan Bendung Gerak Tempe.

Bendung Gerak Tempe dibangun selama tiga tahun, di 2010–2012, pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan

Pembangunan Bendung Gerak Tempe ini memiliki maksud dan tujuan mengembalikan perairan dengan cara mengendalikan air Danau Tempe melalui sungai *outlet* (Sungai Cenranae) pada musim kemarau, sehingga mendapat genangan seluas 132,9 km² di musim kemarau yang bermanfaat



BIMBINGAN TEKNIS LAKIP



Diketahui bersama Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai pejabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

“Dengan demikian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, merupakan laporan akuntabilitas kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA),” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mudjadi, dalam acara Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Ditjen SDA (4/9), Yogyakarta.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban institusi yang sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta Permen PAN dan RB No. 20/2013 tentang Perubahan Lampiran Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2012.

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan laporan akuntabilitas kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi dan misi Ditjen SDA. Mudjadi menambahkan penyusunan LAKIP yang benar tentu saja akan sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten. Untuk itu, diperlukan komitmen antara pimpinan dan seluruh jajarannya dalam menyusun LAKIP.

LAKIP Ditjen SDA tersebut merupakan rangkuman laporan akuntabilitas kinerja dari setiap BBWS dan BWS Satuan Kerja (Satker) di daerah maupun Satker pusat yang disampaikan secara berjenjang sesuai amanat INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengupayakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sebagai persyaratan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*good governance*). Maka selama lima tahun terakhir ini, Ditjen SDA telah melaksanakan pembinaan yang efektif dalam pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada BBWS dan BWS yang diharapkan kedepannya pembinaan ini akan terus dilakukan secara terus menerus.

Pembinaan penyusunan LAKIP di tahun 2013 Ditjen SDA juga turut mengundang Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) untuk mengikuti bimbingan teknis penyusunan LAKIP serta membuat LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN, mengingat kinerja SKPD TP-OP akan memberikan kontribusi terhadap kinerja Ditjen SDA secara keseluruhan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Kemen PU. (*anjldan*)



NORMALISASI KALI SUNTER DI LANUD HALIM PERDANAKUSUMA



Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama (NKB) dengan TNI AU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang penggunaan aset tanah Lanud Halim Perdanakusuma untuk kegiatan normalisasi Kali Sunter, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (3/9), acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Moh. Hasan, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I, Marsda TNI M. Syaugi serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Imam Santoso.

Direktur Jenderal SDA mengatakan bahwa kesepakatan penggunaan ijin tanah ini adalah untuk normalisasi Kali Sunter dalam pengendalian banjir Jakarta dan 1/3 dari total anggaran banjir nasional adalah untuk program pengendalian banjir Jakarta. Normalisasi Kali Sunter progresnya sudah 52% dimana sudah dikerjakan mulai Oktober 2011 dan diharapkan selesai pada Agustus 2014.

“Normalisasi ini melalui Lanud Halim Perdanakusuma dimana yang tadinya lebar 7 meter menjadi 20 meter. Dan tanah yang digunakan adalah tanah lanud yang berada di sebelah kiri sedangkan tanah yang berada di sebelah kanan tidak kita sentuh karena merupakan tanah masyarakat, sehingga dalam hal ini tidak ada relokasi dan tidak ada pembebasan lahan. Selain itu untuk kegiatan pengendalian banjir di Pesanggrahan dan Angke juga diharapkan akan selesai tahun depan. Sisanya hanya tinggal Krukut dan Cipinang, ” lanjut Moh. Hasan.

Banjir yang selalu terjadi beberapa ibukota provinsi di Indonesia termasuk Jakarta di antaranya disebabkan oleh degradasi lingkungan yang berat dan hujan yang ekstrem. Untuk itu diharapkan agar semua pihak dapat saling berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan ini.

Sementara itu Syaugi mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program ini karena digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi banjir yaitu normalisasi Kali Sunter yang melewati Lanud Halim Perdanakusuma.

Lanjut Syaugi, “untuk itu kita menyerahkan aset ini kepada Pemda



DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung program pengendalian banjir dan juga karena ini merupakan tanah negara. Maka dengan adanya penandatanganan naskah yang berlaku selama satu tahun ini diharapkan agar tertib administrasi dan tertib hukum”.

Dalam pelaksanaannya Lanud Halim Perdanakusuma akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pengendalian banjir di beberapa tempat seperti di Pesanggrahan sedang berjalan namun ada beberapa tempat yang memang masih sulit dibebaskan. Untuk normalisasi Kali Sunter ini saya harapkan lebih mudah karena lahannya menggunakan lahan TNI AU sehingga tidak ada ganti rugi dan untuk pengerjaan secara teknisnya akan dilaksanakan oleh Kementerian PU,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. *(tin/anj)*



PERTEMUAN REGIONAL O&P PRASARANA O&P WILAYAH BARAT



Air merupakan salah satu unsur dasar kehidupan. Potensi sumber daya air yang dimiliki suatu bangsa sangat mempengaruhi ekonomi dan perilaku hidup masyarakat. Oleh karenanya, manajemen pengelolaan sumber daya air ini harus dilakukan secara serius sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk keseriusan ini dituangkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui penyelenggaraan Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Wilayah Barat di Pekanbaru (19/8). Dengan tema "Mewujudkan Kemandirian Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Berbasis Partisipasi Masyarakat."

Pertemuan yang telah rutin dilakukan sejak tahun 80-an ini dilatarbelakangi oleh keinginan *stakeholder* terkait untuk menghasilkan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terutama di bidang irigasi. Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memerlukan langkah penyesuaian kebijakan maupun pelaksanaan agar selaras dengan prinsip yang diatur dalam UU tersebut.

Selain itu pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah atas permasalahan yang muncul terhadap implementasi O&P prasarana SDA tahun 2013 sekaligus mengevaluasi sejauh mana komitmen masing-masing pihak atas kesepakatan yang telah dibuat.

Pertemuan regional OP ini juga dipandang perlu untuk memberikan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat kesepakatan yang terkait dengan perubahan kebijakan pengelolaan SDA yang baru.

Diharapkan hasil pertemuan ini dapat mendukung program-program lembaga dan badan pemerintahan yang ada di wilayah barat seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Lampung, terutama terkait program operasi peningkatan produksi pangan.



Dalam sambutannya, Kepala Dinas PU Provinsi Riau, SF.Haryanto, mengatakan sasaran yang ingin dicapai dari pertemuan ini adalah berfungsinya seluruh jaringan irigasi secara optimal melalui pengelolaan O&P prasarana SDA untuk mendukung surplus padi 10 juta ton tahun 2014 dalam skala nasional, serta untuk mengoptimalkan potensi daerah irigasi dan rawa serta fungsi jaringannya. Adapun keluaran yang ditargetkan adalah tersedianya dokumen pengelolaan dan usulan pembiayaan O&P SDA tahun 2014.

Pertemuan ini turut dihadiri Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hartanto, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Muh. Marwan, perwakilan Gubernur Provinsi Riau, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Bappenas, Dewan Sumber Daya Air Nasional, dinas dan badan terkait di lingkungan pemerintahan Wilayah I. (idr)



HASIL PERTEMUAN REGIONAL O&P WILAYAH BARAT DI PEKANBARU:

MENGEDEPANKAN KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT



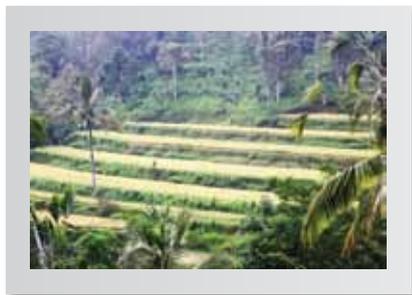
Pertemuan Regional Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Prasarana Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Barat di Pekanbaru (21/08), menghasilkan beberapa rumusan yang disepakati oleh peserta pertemuan. Rumusan tersebut diantaranya mengenai poin-poin kebijakan umum operasi dan pemeliharaan SDA; harmonisasi perencanaan O&P sumber daya air dan perencanaan pembangunan daerah; kerjasama pengelolaan O&P SDA berbasis kewenangan; ketahanan pangan, peluang dan potensi pengelolaan O&P SDA berbasis partisipasi masyarakat; dan kesepakatan tentang penyelenggaraan pertemuan regional operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air tahun 2014.

Salah satu masalah kebijakan umum yang disepakati adalah pembangunan sektor sumber daya air harus lebih mengedepankan kemandirian pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri. Untuk itu diperlukan komitmen bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota dewan, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasinya.

Hasil rumusan juga mencakup usulan pengharmonisan perencanaan O&P SDA dan perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya prioritas dalam penentuan program kegiatan dan anggaran bersumber dari APBD yang terkait dengan perencanaan kebijakan O&P prasarana SDA yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu fasilitasi pemerintah dalam melakukan internalisasi O&P SDA dalam perencanaan pembangunan daerah juga dirasa penting. Dalam melakukan fasilitasi tersebut diharapkan adanya peningkatan koordinasi antar-SKPD terkait dalam perencanaan O&P prasarana SDA.

Masih berkaitan dengan pengharmonisasian perencanaan O&P SDA, juga diusulkan adanya ketetapan prosedur internalisasi O&P prasarana SDA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu diperlukan adanya penetapan *role sharing* internalisasi O&P prasarana SDA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menyoroti masalah kerjasama pengelolaan O&P SDA berbasis kewenangan, hal tersebut mencakup aspek SDM kerjasama lintas kewenangan dan pembiayaan. Permasalahan yang muncul diatasi dengan usulan pembentukan Unit kerja struktural O&P SDA yang handal dengan dimasukkannya eselonisasi (eselon III), penambahan personil dan peningkatan kesejahteraan petugas O&P prasarana SDA.



Terkait dengan koordinasi dan kerjasama pengelolaan yang belum optimal, perlu dilakukan sosialisasi Surat Edaran tentang pengelolaan sungai, rawa, danau dan waduk, peningkatan intensitas koordinasi internal dan eksternal antar instansi yang membidangi SDA, serta penyamaan persepsi tentang visi dan misi pentingnya pengelolaan O&P.

Sementara untuk menangani masalah tingginya laju kerusakan prasarana SDA yang terjadi di daerah perlu adanya dukungan dari Pemerintah dalam hal pembiayaan (bisa berupa *reward*) guna memenuhi kebutuhan pembiayaan O&P SDA di daerah agar bisa sesuai dengan AKNOP (Angka Kebutuhan Nyata Operasi & Pemeliharaan).



Pertemuan turut menyoroti masalah ketahanan pangan peluang dan potensi pengelolaan O&P SDA berbasis partisipasi masyarakat. Masyarakat (P3A/Kelompok Tani) diikutsertakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *monitoring*, sampai evaluasi. Jika partisipasi belum mampu diimplementasikan oleh masyarakat, maka dapat terlebih dahulu dilakukan kontrak kerjasama (KSO). Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara luas dalam O&P dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan-

kegiatan O&P prasarana SDA kepada masyarakat.

Hasil rumusan tersebut ditandatangani bersama oleh perwakilan peserta pertemuan dari wilayah barat, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Di akhir acara disepakati bahwa pertemuan regional O&P prasarana berikutnya akan dilaksanakan di Medan, pada April 2014. (*idr*)



SIDANG PLENO II TKPSDA WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE MEMBAHAS PENETAPAN WILAYAH SUNGAI



“Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air adalah dalam hal penyediaan air baku dengan kualitas yang baik dan jumlah yang cukup. Untuk itu diperlukan sosialisasi dengan masyarakat yang berkaitan dengan banjir dan pelestarian lingkungan,” kata Imam Santoso.

Imam menambahkan, TKPSDA ini dapat menjadi wadah untuk memberikan ide dan menyelesaikan masalah yang timbul di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dalam lingkup kerja Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane.

Ketersediaan akan sumber daya air relatif konstan sedangkan kebutuhan semakin meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang bertambah. Di sisi lain, kualitas air cenderung menurun tetapi aktivitas dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya meningkat. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu berbasis wilayah sungai. Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, Imam Santoso saat membuka Sidang Pleno II Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Ciliwung–Cisadane, Jakarta (2/10).



Pada sidang pleno ini dilakukan pemaparan rancangan pola pengelolaan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Selain itu, sidang komisi juga berupaya menyusun rancangan yang akan disahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah mendapat rekomendasi dari TKPSDA wilayah sungai Cilicis.

Yang menjadi dasar penetapan wilayah sungai adalah dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air, keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) basah dan DAS kering dengan tercukupinya setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

“Kita mempunyai air yang lebih dari cukup, terdapat air berarti bisa membuat irigasi, pangan dan energi, tinggal kita mau gunakan untuk apa”, jelas Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Pitoyo Subandrio.

Selain itu dalam pembangunan diperlukan sempadan baik itu sempadan sungai maupun sempadan



pantai. Sempadan sangat penting di perkotaan. Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan. Jika terjadi bencana, maka Pemerintah yang akan bertanggung jawab. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dalam mendirikan sebuah bangunan tidak dibangun di atas sempadan, karena jika terjadi

bencana maka akan menjadi tanggung jawab sendiri. Contohnya seperti Kali Joge di Yogyakarta yang dibuat sebuah permukiman.

Turut hadir Ketua TKPSDA yang juga sebagai Kepala Bappeda DKI Jakarta Sarwo Handayani, perwakilan Gubernur Jawa Barat dan anggota TKPSDA WS Cilicis.



INDONESIAN RIVERBOARDING ASSOCIATION : SALAM SEJAJAR!



Indonesian Riverboarders mulai aktif sejak tahun 2007, dan mulai dibentuk dalam format kepengurusan di tahun 2008. Hingga saat ini, perkumpulan para pecinta olahraga di sungai ini, yang dinamakan Indonesian Riverboarding Association, telah memiliki sekitar 50 klub yang tersebar di 17 provinsi se-Indonesia. Pencapaian kegiatannya yang terbesar hingga saat ini adalah akan menjadi tuan rumah berlangsungnya *World Riverboarding Championship* tanggal 6–11 November 2013, yang akan bertema “*Save The Future of Citarum*”.

Komunitas pecinta sungai ini selain menjalankan hobinya, juga menjadi pembawa pesan secara langsung kepada masyarakat sekitar untuk menjaga sungai. “*Riverboarding* gak butuh biaya mahal, ban bekas bisa digunakan untuk latihan permulaan”. Oleh karena itu, “otomatis masyarakat ngerti kalo air sungai mesti bersih, supaya enak buat olahraga, buat kepentingan kita juga”, demikian kata Randy, Ketua Indonesia Riverboarding Provinsi Jawa Barat.

Bukan hanya untuk sekedar menyalurkan hobi, Indonesian Riverboarding Association, dalam aktivitasnya juga banyak dilibatkan oleh Badan SAR (*Search and Rescue*) untuk menolong dan mencari korban yang hanyut di sungai ataupun korban banjir. "Karena lebih efektif, daripada (menggunakan) perahu karet, bisa ke lokasi sesempit mungkin", tutur salah seorang anggota senior, Kang Rahim.

Walaupun terlihat menyenangkan, namun olahraga yang bisa dikatakan ekstrim ini, memerlukan *skill* yang mumpuni dari setiap individu, hal ini dikarenakan olahraga ini dimainkan pada sungai yang berarus deras.

Indonesian Riverboarding mengapresiasi secara positif kegiatan yang dilaksanakan Ditjen. SDA untuk mengkampanyekan gerakan bersih sungai kepada masyarakat, dan hal itu juga sesuai dengan harapan komunitas ini agar masyarakat turut aktif memelihara kebersihan sungai, bukan hanya mengeksploitasinya atau bahkan mencemari sungai yang berakibat pada kehancuran lingkungan alam dan membahayakan jiwa manusia.



Komunitas ini menyatakan bahwa pendekatan sosial kepada masyarakat sama pentingnya dengan pendekatan struktural. "Melalui kegiatan lomba foto, kumpul-kumpul banyak komunitas sungai dengan Pemerintah, arung sungai, lebih mendekatkan Pemerintah kepada masyarakat", lanjut Kang Rahim.

Indonesian Riverboarding Association memperkenalkan salam yang juga dipakai para *Riverboarders* seluruh dunia, "Salam Seajar!". Salam ini menggambarkan kesetaraan setiap manusia bila sudah dalam posisi merebah di permukaan sungai. Hal ini berarti pula setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai". (nan)

